

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan demikian, segenap potensi dan sumber daya harus dialokasikan secara efektif dan efisien dengan adanya pembangunan daerah secara merata dan dilakukan melalui proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus (Arraniry, 2018).

Salah satu sumber dana dalam membiayai urusan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Anggoro (2017) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan segala bentuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemajuan suatu daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menggambarkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya semakin berkurang (Anggoro, 2019).

Sektor Pariwisata merupakan salah satu objek yang memiliki peran penting dan strategis bagi pengembangan suatu daerah terlebih dengan era otonomi daerah seperti pada masa saat ini. Menurut Hilman (2019) pariwisata

merupakan keseluruhan fenomena dan relasi yang disebabkan oleh perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan maksud untuk mencari kesenangan, rasa ingin tahu dan singgah sementara waktu. Pengembangan di bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang biasa diperoleh dari peningkatan sektor pariwisata. Berbagai manfaat yang didapat antara lain yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan bagi masyarakat sekitar, serta memacu berkembangnya berbagai sektor produktif lainnya (Soeswoyo, 2019).

Pengembangan sektor pariwisata berkaitan erat dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti restoran dan sarana akomodasi (hotel, villa dan lain-lain). Selain itu sektor pariwisata memiliki keterkaitan dengan travel agen, *money changer*, alat transportasi, infrastruktur serta destinasi pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Berbicara mengenai sektor pariwisata tidak hanya melihat dari obyek wisata saja, namun juga sarana dan prasarana pendukung dalam pariwisata. Hal tersebut karena obyek wisata tidak akan menarik wisatawan untuk berkunjung jika tidak diimbangi dengan kondisi di sekitarnya yang ikut mendukung, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai pengaruh pada bidang pendukung lainnya (Haryanto, 2015).

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Letaknya di bagian ujung barat dan sisi selatan dari Provinsi Jawa Timur yang lebih dikenal dengan kota reog. Hal tersebut karena Ponorogo terkenal dengan kesenian reognya. Kesenian ini sudah terkenal sampai

mancanegara serta banyak negara yang sudah mengenal dan mengakui kesenian ini. Selain itu, Ponorogo memiliki banyak potensi wisata, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata budaya, wisata religi, kesenian dan masih banyak lagi.

Wisata kebudayaan yang diadakan setiap bulan Suro (Muharram) di Kabupaten Ponorogo yaitu mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Perayaan Grebeg Suro merupakan sebuah agenda rutin setiap tahun untuk menyambut pergantian tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan mendapatkan perhatian serta dinantika oleh masyarakat Ponorogo maupun kota lain termasuk para turis dari mancanegara. Berbagai acara yang digelar dalam perayaan Grebeg Suro tersebut diantaranya yaitu pawai lintas sejarah, kirab pusaka, festival reog nasional, larungan risalah doa di Telaga Ngebel dan lain sebagainya.

Berbagai obyek wisata dan agenda tahunan tersebut tentunya dapat menarik minat para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Ponorogo sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan fasilitas pendukung dalam pariwisata. Hotel merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam berwisata sebagai sarana menginap atau hanya sekedar beristirahat. Selain itu restoran maupun rumah makan merupakan sarana paling penting untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama berpariwisata. Sektor pariwisata tersebut saling berkaitan erat dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah. Berikut realisasi PAD serta kontribusi dari sektor pariwisata meliputi obyek pariwisata serta sarana pendukung pariwisata yaitu hotel dan restoran dari tahun 2014-2019:

**Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Ponorogo
Tahun Anggaran 2014-2019
(dalam rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Sektor Pariwisata	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	3.622.190.328	198.730.421.479,94	1,82%	Sangat kurang
2015	5.280.612.399	210.695.348.134,82	2,50%	Sangat kurang
2016	7.239.216.674	240.111.321.573,88	3,01%	Sangat kurang
2017	8.138.416.323	308.232.104.639,07	2,64%	Sangat kurang
2018	10.041.965.028	289.017.741.958,47	3,47%	Sangat kurang
2019	12.051.888.800	290.815.307.168,20	4,14%	Sangat Kurang
			2,93%	Sangat kurang

Sumber: Data diolah dari data BPPKAD Kabupaten Ponorogo

Dilihat data tersebut menggambarkan kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014-2019 meliputi obyek pariwisata dan hiburan serta sarana pendukung yaitu hotel dan restoran. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017 kontribusi mengalami penurunan karena target PAD meningkat relatif banyak dari tahun sebelumnya. Rata-rata keseluruhan kontribusi yang disumbangkan dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,93%. Apabila dilihat dari masing-masing kontribusi yang disumbangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah, pajak restoran paling banyak berkontribusi dibanding sektor yang lain yaitu sebesar 1,52%, yang kedua yaitu dari retribusi obyek pariwisata sebesar 0,56%, yang ketiga dari pajak hiburan sebesar 0,47% dan selanjutnya kontribusi terendah dari pajak hotel sebesar 0,37%. Jumlah tersebut tergolong kecil, karena sektor pariwisata merupakan sebagian dari penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Namun, kontribusi dari obyek pariwisata dan sarana pendukungnya sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah dan kemajuan daerah.

Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata yaitu dengan berbagai program dan menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, visi Pemkab Ponorogo dianggap memiliki basis dukungan kuat terhadap sektor pariwisata menjadikan Kabupaten Ponorogo memperoleh penghargaan dalam Anugerah Wisata Jawa Timur tahun 2018. Pemkab Ponorogo dinyatakan berhak menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena komitmen dalam mengembangkan sektor pariwisata. Pemberian penghargaan Anugerah Wisata Jawa Timur 2018 ini telah diterima Pemkab Ponorogo pada Selasa (23/10/2018) di Surabaya (<https://www.solopos.com/ponorogo-raih-anugerah-wisata-bupati-ipong-kaget-949005> diakses pada 8 Maret 2020).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah antara lain dilakukan oleh Muchlisin (2019), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nganjuk yang menyatakan kontribusi retribusi obyek wisata di Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami peningkatan dan masih terbilang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan kontribusi pajak hotel dan restoran selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014–2018 dengan pertumbuhan sebesar 0,16%. Penelitian kedua oleh Hastuti (2011), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul yang menyatakan bahwa kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD selama 5 tahun mengalami fluktuasi, laju pertumbuhan retribusi pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul mengalami kenaikan dan penurunan, tingkat efisiensi kurang efisien, dan efektivitas secara keseluruhan dapat dikatakan sangat efektif.

Penelitian yang ketiga dari Asti Karini & Agustiani (2018) yang dilakukan di Kota Bandung, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa realisasi penerimaan pendapatan sektor pariwisata di Kota Bandung pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang berbeda-beda dan tingkat efektivitas sebesar 106,62%. Sedangkan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan menunjukkan bahwa apabila pendapatan sektor pariwisata meningkat maka PAD akan meningkat.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Muchlisin (2019) tentang pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengambil variabel kontribusi dan laju pertumbuhan pendapatan sektor pariwisata. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asti Karini & Agustiani (2018) di Kota Bandung dengan mengambil variabel efektivitas pendapatan dari sektor pariwisata. Ketiga penelitian dari Hastuti (2011) dengan mengambil variabel efisiensi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan periode penelitian dari tahun 2014 sampai dengan 2019.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan mengambil judul tentang **“ANALISIS PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENYUMBANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PONOROGO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana laju pertumbuhan pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pendapatan rill sektor pariwisata terhadap anggaran yang ditetapkan?
4. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan dari sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pendapatan rill sektor pariwisata terhadap anggaran yang ditetapkan.
4. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemungutan dari pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi peneliti maupun pihak lain diantaranya yaitu :

1. Bagi Universitas

Diharapkan skripsi dapat tersusun dengan baik, sehingga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi tentang sektor publik yaitu mengenai pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi pertimbangan untuk terus meningkatkan kualitas serta terus mengembangkan sektor pariwisata sehingga dapat menjadi daya tarik pariwisata dan menambah PAD Kabupaten Ponorogo

3. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh dari peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik terutama pada pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Ponorogo dan sejauh mana ilmu yang di dapat dari Universitas dapat di terapkan di masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai sektor publik yaitu mengenai pendapatan sektor pariwisata dan dapat di kembangkan lagi menjadi lebih luas.